

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH (DPUD) PULAU
SENUA DESA SEPEMPANG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2017**

Penulis Ade Irawan¹, Oksep², Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri³
adeirawan011294@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The tourism sector, which has played a role as one of the largest foreign exchange earners both on a world scale and in Indonesia, has become an important sector that the government can rely on to become the main pillar of national economic development. The development of the leading tourist destination of Senua Island requires integrated, comprehensive and sustainable steps according to the direction of regional tourism development policies and feasible in stages to be developed. Regional leading tourist destinations include tourism destinations that have regional tourism corridors that have potential tourism resources and have an important influence on economic, social and cultural growth, empowerment of natural resources, environmental carrying capacity and regional competitiveness. In the Natuna Regency Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA) contains the main points of policy and development which is the embodiment, utilization and planning of tourism development which includes spatial issues, land use and physical plans as well as the determination of priority areas that are developed in accordance with characteristics as the direction and guidelines for the implementation of development, control and supervision of tourism development in the Natuna Regency. The purpose of this study was to determine the Implementation of Regent's Regulation Number 16 of 2013 concerning the Development of Regional Superior Tourism Destinations (DPUD) of Senua Island in Natuna Regency in 2017 using the Van Meter and Van Horn theory. The method used in this study was descriptive qualitative. The results of this study are the implementation in the development of Senua Island tourism that the Targets and Standards of leading tourism destination policies in the island of senua are already on target, but those who manage human resources are inadequate, communication between organizations is not optimal and is constrained regarding land acquisition budget. Researchers hope that the need for additional human resources to manage Natuna tourism destinations, especially Senua Island and also the government should immediately accelerate the resolution of land disputes on the Senua Island between land owners and the Government. So the government has no obstacles in the development and development of existing infrastructure and facilities on Senua Island.

Keywords: Implementation, Development, Tourism

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar baik dalam skala dunia maupun di Indonesia, menjadi sektor penting yang dapat diandalkan pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sector pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat member kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sector andalan dalam pembangunan di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai daerah provinsi yang memiliki letak geografis yang strategis di perbatasan beberapa Negara tetangga, maka pembangunan pariwisata Kepulauan Riau menjadi penting dan strategis untuk dipacu perkembangannya untuk menangkap peluang pasar wisata, baik itu pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kepulauan Riau sebagai pondasi dasar bagi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kepulauan Riau untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan, menjadi kunci yang sangat penting dalam memperkuat eksistensi dan memacu pembangunan Kepulauan Riau yakni “Terwujudnya visi pariwisata Kepulauan Riau sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional”.

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2013 tentang penetapan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) Kabupaten Natuna menjelaskan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar nasional maupun internasional. Pengembangan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehens dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah serta keunggulan komprehensif.

Implementasi pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikan demi kelangsungan generasi berikutnya. Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah terinventarisasi dengan baik potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga pembinaan bersifat dinamis dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya serta peninggalan sejarah.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, juga diperlukan langkah-langkah yang serasi antara pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun masyarakat sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral. Dalam pembangunan pariwisata daerah juga diperlukan adanya pembangunan sumber daya manusia yang berbasis pada kompetensi yang dimana sumber daya manusia dituntut untuk terus berkembang dan memiliki kemampuan yang handal untuk menjawab tantangan globalisasi. Sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi haruslah memiliki kompetensi yang dibutuhkan agar organisasi tersebut dapat tetap hidup dan berkembang. Oleh sebab itu sebuah organisasi juga harus memiliki strategi dan manajemen strategi yang baik agar suatu organisasi dapat tercapai. Arah pengembangan pariwisata Natuna dengan mewujudkan ketersediaan *Attraction, Accessibility, Amenity dan ancilliary* di Kabupaten Natuna. Konsep pengembangan pariwisata Natuna menitik beratkan pada *Marine, Ecotourism* dan Arkeologi (MEA) Serta melibatkan pelaku usaha pariwisata dalam pembangunan daerah wisata unggulan.

Sebagai salah satu destinasi wisata, Kabupaten Natuna memiliki berbagai tempat dan budaya yang dapat dikembangkan diantaranya yaitu objek wisata Pulau Senua, objek wisata Pulau Setaii, objek wisata Desa Tanjung Kumbik & Pulau Setaii Pulau Tiga, objek wisata Teluk Selahang dan objek wisata Desa Limau Manis.

Pulau Senua merupakan salah satu ikon destinasi unggulan Kabupaten Natuna yang memiliki daya tarik dengan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang

berupa keanekaragaman kekayaan alam bawah laut. Keunikan daya tarik utama dari Pulau Senua adalah pantai pasir putih, pulau berbentuk orang hamil terbaring di laut, goa sarang wallet, konservasi penyu dan wallet, air laut yang jernih & terumbu karang serta scuba dan snorkeling. Berikut ini data mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur laut tahun 2014-2017 di Pulau Senua.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara Pulau Senua Tahun 2014-2017

No	Hari/Tgl/Tahun	Objek Wisata	Asal Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan
1	Sabtu 8 Oct 2014	Pulau Senua	Australia, Jerman, Kanada, Usa	100 Wisatawan
2	Sabtu 20 Sep 2016	Pulau Senua	Australia, Jerman, Usa, Kanada dan Inggris	100 Wisatawan
3	Kamis 27 April 2017	Pulau Senua	Jerman	105 Wisatawan

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat merupakan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak teratur dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sebuah tugas dinas terkait mengenai promosi kepariwisataan dalam pengembangan daerah wisata unggulan Natuna. Masalah yang terjadi di dalam proses pengembangan destinasi pariwisata penting untuk diteliti karena menyangkut adanya suatu hal yang terjadi di dalam pelaksanaan program yang belum sesuai dengan isi program dan dapat menjadikan penurunan pengunjung yang akan datang ke objek wisata tersebut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami bagaimana implementasi sebuah program berdampak pada kemajuan dan peningkatan pengunjung melalui program pengembangan destinasi pariwisata.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Bungin, 2005:133) yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record*, dan *handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengikuti konsep model Miles dan Huberman dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2012:246-252) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Berikut ini beberapa informan yang peneliti wawancarai diantaranya adalah:

Tabel 2. Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan/Jabatan
1	Bapak Erson Gempa Apriandi	49	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
2	Bapak Arif Naen	31	Pelaku Wisata
3	Bapak Heri	52	Ketua Kelompok Nelayan Desa Sepempang
4	Bapak Ardianto	25	Ketua Karang Taruna Desa Sepempang
5	Ibu Ida	40	Ibu Rumah Tangga
6	Bapak Taulan	52	Petani
7	Bapak Hendri	45	Nelayan

Sumber: Data olahan peneliti

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Pulau Senua Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2017. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Penelitian oleh Lusita Anjalina (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang mana di dalamnya menitikberatkan pada implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu (1) standar dan tujuan, (2) sumber daya, (3) komunikasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan ekonomi sosial dan politik, (6) sikap kecenderungan pelaksana. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat masalah dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata Pantai Tanjung Setia yang belum optimal antara lain dipengaruhi oleh faktor sumber daya, baik sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas maupun sumber daya finansial, serta intensitas komunikasi antar agen pelaksana sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi kebijakan pengembangan wisata Pantai Tanjung Setia.

Penelitian oleh Arfandi, S,Sos dan Dr. Oksep Adhayanto,SH.MH/ (2017) dengan judul Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman. (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas). Jurnal ini berisi tentang kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan variabel teori Van Horn dan Van Meter mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial,ekonomi dan politik. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dibantu dengan survei. Hasil dari penelitian bahwa kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas didalam proses implementasinya yang diukur melalui variabel yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter yakni proses implementasinya belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan

kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga menghambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas.

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Lusita Anjalina (2017)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas implementasi mengenai kebijakan objek pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, membahas mengenai pengembangan destinasi wisata unggulan. • Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu (1) standar dan tujuan, (2) sumber daya, (3) komunikasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan ekonomi sosial dan politik, (6) sikap kecenderungan pelaksana • Lokasi penelitian di Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang.
2.	Penelitian oleh Arfandi, S,Sos dan Dr. Oksep Adhayanto,SH.MH/ (2017)	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman. (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif. • Menggunakan teori yang sama dengan teori Van Meter dan Van Horn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian membahas pariwisata dengan berbasis maritime sedangkan peneliti membahas pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah. • Lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Anambas sedangkan peneliti meneliti di Kabupaten Natuna.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap peneliti sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Ditinjau dari penelitian penetapan destinasi pariwisata unggulan daerah kabupaten natuna pulau senua, maka peneliti menggunakan 5 teori Van Meter dan Van Horn yakni:

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi dapat di ukur keberhasilannya berdasarkan standar dan sasaran kebijakan. Standar kebijakan pariwisata dalam pengembangan wisata pada dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi untuk generasi yang akan datang. Untuk itu pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang terkait. Dibutuhkan pula sinergi kebijakan dengan multisektor, sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasaran kebijakan pengembangan pariwisata diperuntukkan untuk peningkatan

pendapatan masyarakat yang berada di sekitar pulau senua terkhusus, kemudian untuk pendapatan daerah, maupun pendapatan devisa negara yang mana dalam sasaran kebijakan pengembangan pariwisata ini tidak hanya untuk masyarakat lokal tetapi untuk secara global. Acuan yang dipakai dalam hal pengembangan destinasi wisata unggulan ini mengacu pada RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) kabupaten Natuna yang mana beberapa hal acuan dijadikan sebagai acuan standart operasional prosedur (SOP) dalam pengembangan destinasi wisata Pulau Senua.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Adapun cakupan sumber daya di dalam penelitian ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam yang kami teliti saat ini adalah potensi sumber daya alam wisata pulau Natuna, khususnya pulau Senua yang dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan. Disamping sumber daya alam yang memadai diperlukan pula sumber daya manusia untuk berperan penting dalam pengelolaan pengembangan pariwisata Pulau senua.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan ditandai dengan empat kondisi yaitu anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata, pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan, kualitas habitat kehidupan liar, pengguna energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung, dan bentuk-bentuk transportasi alternative.

Upaya pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di Kabupaten Natuna terutama yang terdapat masyarakat sekitar oleh pemerintah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan wisata, pemerintah membawa pemangku kepentingan yang berada disekitar destinasi seperti Lurah, Kepala Desa dan Ketua POKDARWIS sebagai refresentatif masyarakat, dalam focus club discussion (FGD) untuk pengembangan destinasi di masing-masing destinasi wisata tersebut.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan upaya membangun kesamaan makna yang mampu mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Diperlukan pula sebuah komunikasi terarah melalui sebuah koordinasi antara beberapa sektor yang menjadi penggerak dalam kelangsungan pariwisata seperti *stake holder*, masyarakat, SKPD serta agent pariwisata.

Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi bisa terjadi dalam bentuk formal dan informal. Komunikasi formal terjadi pada saat rapat bulanan, rapat dalam forum SKPD ataupun rapat dalam FGD (*forum discussion group*). Sedangkan komunikasi antar organisasi informal biasanya terjadi pada saat diluar jam kerja seperti temu langsung, melalui telepon atau jejaring sosial.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu implementasi kebijakan pengembangan pariwisata agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui oleh agen pelaksana yang mencakup skruktur birokrasi, pola-pola dan norma-norma yang berlaku dalam lingkup instansi dinas pariwisata. Dengan demikian cakupan karakteristik dari instansi dinas pariwisata meliputi adanya struktur organisasi dinas pariwisata, pembagian kewenangan, hubungan antar unit dalam dinas serta hubungan dinas pariwisata dengan instansi terkait.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Daerah potensial Pulau Senua menjadi tujuan wisata dalam pengembangan pariwisata harus memperhatikan unsur-unsur dalam pengembangannya diantaranya yakni mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan kondisi sosial mengenai interaksi masyarakat ataupun serta peran serta masyarakat dalam andil mengikuti kegiatan serta program kepariwisataan yang berhubungan dengan pengembangan wisata Pulau Senua. Diantaranya beberapa masyarakat ikut andil dalam

kegiatan seperti gotong royong bersih pantai Pulau Senua, ikut serta dalam panitia kegiatan dalam setiap event yang diadakan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

IV. Kesimpulan

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang kami buat mengenai Implementasi Perbup No 16 tahun 2013 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Pulau Senua tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran dan Standar kebijakan destinasi pariwisata unggulan daerah pulau senua sudah di nilai tepat sasaran nya berdasarkan letak geografis, keindahan alam yang mempunyai potensi wisata unggulan seperti pantai pasir putih, letak pulaunya strategis terumbu karang yang indah. Namun dalam hal ini kendala yang dimiliki wisata pulau senua ini mengenai kendala aksesstabilitas menuju pulau Senua. Akses yang ditempuh untuk sampai kepulau senua terbilang mahal baik jalur udara serta laut serta jarak tempuh yang terbilang cukup jauh.
2. Sumber daya manusia dalam hal mengelola wisata pulau senua kurang memadai serta keahlian dibidang masing-masing dapat dilihat dari jumlah staf yang mengelola destinasi pariwisata tersebut serta belum matangnya pelatihan khusus pengelolaan wisata.
3. Komunikasi antar organisasi telah dilakukan namun belum secara kontinue dengan masyarakat sehingga dalam pengembangan wisata pulau Senua masih belum maksimal, serta hubungan antar instansi terkait belum maksimal.
4. Koordinasi antar agen pelaksana baik dari pemerintah dengan pelaku wisata seperti agen travel wisata, penyedia jasa transportasi, penginapan dll sudah baik jadi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan adanya pelatihan khusus dibidang pariwisata.
5. Peran masyarakat dengan adanya Wisata Pulau Senua disambut dengan antusias dengan keikutsertaan masyarakat menjadi pelaku bisnis dibidang wisata serta berperan dalam mengembangkan wisata Pulau Senua. Kemudian dengan adanya Wisata Pulau Senua berperan dalam menambah pendapatan masyarakat yang mana sebelumnya pendapatan masyarakat hanya berdasarkan dengan hasil laut saja. Kini penghasilan masyarakat memiliki opsi dari bidang pariwisata. Disamping itu pula menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna melalui baik pengunjung lokal maupun turis mancanegara. Dalam kondisi Politik terkendala pada sengketa lahan antar Dinas Pariwisata dengan pemilik lahan yang mana tidak memiliki titik temu saat ini dalam pemecahan masalahnya.

b. SARAN

1. Pemerintah harus lebih memfokuskan wisata tersebut melalui penambahan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, seperti musola untuk sholat, penambahan transportasi khusus untuk ke pulau senua, fasilitas alat permainan air dan lainnya, Sehingga wisata tersebut menarik untuk dikunjungi. Kemudian dalam pengemasan promosi wisata perlu ditingkatkan. Sehingga membuat wisata Pulau Senua berbeda dari wisata lainnya.
2. Perlu adanya penambahan SDM yang mengelola Destinasi wisata Natuna khususnya Pulau Senua.
3. Pemberian pelatihan secara rutin kepada Pelaku Wisata yang berada di Natuna.
4. Sebaiknya pemerintah segera mempercepat menyelesaikan sengketa lahan yang ada di Pulau Senua antara pemilik lahan dan Pemerintah. Sehingga pemerintah tidak ada kendala dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas yang ada di Pulau Senua.
5. Sebaiknya pemerintah membangun infrastruktur bermain dan menghibahkan kepada masyarakat setempat untuk dikelola bersama pemerintah.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Ansori, Yusak. 2010. *“Tourism Board: Strategi Promosi Pariwisata Daerah”*. Surabaya: Putera Media Nusantara.
- Azam dan Mendra, 2011. *“System Pemerintahan Daerah”*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Desky, MA. 2011. *“Manajemen Perjalanan Wisata”*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Hakim, Luchman. 2004. *“Dasar-Dasar Ekowisata”*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *“Pengantar Ilmu Pariwisata”*. Yogyakarta: ANDI
- Sunaryo, Bambang. 2013. *“Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Spilanne, James J, 2002. *“Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya”*. Jakarta: Kanisius
- Syafiie, Kencana. I, 2011. *“Pengantar Ilmu Pemerintahan”*. Yogyakarta: Rafika Aditama..
- Yoeti, Oka A. 1996. *“Pengantar Ilmu Pariwisata”*. Edisi Revisi. Bandung: Angkasa.

Jurnal

- Arfandi dan Adhayanto, Oksep. *“Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman: Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas”*. Jurnal Vol I No.2 Februari 2017
- Kusworo, Hendri Adji dan Janianton Damanik. 2002. *“Pengembangan SDM Pariwisata Daerah”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No.1, Juli 2002, p.1-2

Peraturan Perundangan-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Natuna.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2025
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Natuna.
- Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Natuna.